

PERAN DINAS SOSIAL KOTA SEMARANG DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DISABILITAS

Meyfita Esti Cahyani, Susi Sulandari, Dyah Hariani

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof H Soedarto, S.H Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

Abstract

People with disabilities who are included in the DTKS (Integrated Data on Social Welfare) of Semarang City in 2020 are 3,243 people while the total number of people with disabilities in Semarang City is 5,800 people. This problem certainly requires the role of the Semarang City Social Service to improve the welfare of the disabled community. The purpose of this study is to describe and analyze the role of the Semarang City Social Service in improving the welfare of people with disabilities and their driving and inhibiting factors. This research method is descriptive qualitative. The data collection techniques of this research are observation, interview, documentation and literature study. Determination of the subject in this study was done by purposive sampling method. The theory used is the role theory according to Jam Ife and Frank Tesoriero covering facilitative, educational, representative and technical roles. The results of the research conducted are that the role of the Semarang City Social Service in improving the welfare of the disabled community is quite good. The role that is not well implemented is the four role indicators, namely the facilitative role. The driving factors for the role of the Semarang City Social Service in improving the welfare of the disabled community consist of competence, socialization and role behavior while the inhibiting factors are role transition and role distance.

Keywords: Role, Welfare, Disability

Abstrak

Masyarakat disabilitas yang masuk pada DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) Kota Semarang tahun 2020 yaitu 3.243 orang sedangkan jumlah keseluruhan masyarakat disabilitas Kota Semarang yaitu 5.800 orang. Permasalahan tersebut tentu memerlukan peran Dinas Sosial Kota Semarang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat disabilitas. Tujuan penelitian ini yaitu mendeskripsikan dan menganalisis peran Dinas Sosial Kota Semarang dalam meningkatkan kesejahteraan disabilitas beserta faktor pendorong dan penghambatnya. Metode penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Penentuan subjek dalam penelitian ini dilakukan dengan metode *purposive sampling*. Teori yang digunakan adalah teori peran menurut Jam Ife dan Frank Tesoriero meliputi peran fasilitatif, edukasional, representatif dan teknis. Hasil penelitian yang dilakukan yaitu peran Dinas Sosial Kota Semarang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat disabilitas sudah cukup baik. Peran yang pelaksanaannya kurang baik dari empat indikator peran yaitu peran fasilitatif. Faktor pendorong peran Dinas Sosial Kota Semarang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat disabilitas terdiri dari kompetensi, sosialisasi dan perilaku peran sedangkan faktor penghambatnya yaitu *role transition* dan *role distance*.

Kata kunci : Peran, Kesejahteraan, Disabilitas

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesejahteraan masyarakat selalu berkaitan dengan tingkat kemiskinan yang terdapat di sebuah daerah karena ketika masyarakat menderita kemiskinan dapat dikatakan kualitas hidup manusia atau masyarakatnya juga akan mengikuti. Indikator yang dapat digunakan dalam melakukan pengukuran terhadap kualitas hidup manusia ialah IPM (Indeks Pembangunan Manusia), dimana tujuannya ialah mengukur tingkat kesejahteraan manusia. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial menurut UU No. 11 Tahun 2009 sendiri meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial. Adapun, IPM Kota Semarang yaitu dapat dicermati pada tabel 1.1 :

Tabel 1. 1

Indeks Pembangunan Manusia Kota Semarang Tahun 2010-2019

Tahun	IPM
2010	76.96
2011	77.58
2012	78.04
2013	78.68
2014	79.24
2015	80.23
2016	81.19
2017	82.01
2018	82.72
2019	83.19

Sumber : BPS 2020

Menurut BPS sendiri terdapat beberapa kategori, yaitu (1) $IPM < 60$: IPM rendah, (2) $60 \leq IPM < 70$: IPM sedang, (3) $70 \leq IPM < 80$: IPM tinggi, (4) $IPM \geq 80$: IPM sangat tinggi. Berdasarkan kategori IPM maka IPM Kota Semarang dari tahun 2010-2014 berada pada kategori IPM tinggi, sedangkan dari tahun 2015-2019 IPM Kota Semarang pada kategori sangat tinggi.

Terlepas dari hal itu presentase kemiskinan Kota Semarang dari tahun 2018-2020 tergolong kecil. Hal ini dapat dicermati melalui tabel 1.2.

Tabel 1. 2

Presentase Kemiskinan Kota Semarang

Tahun	Presentase
2018	4,14%
2019	3,98%
2020	4,34%

Sumber : BPS 2021

Berdasarkan tabel 1.2 dapat diketahui bahwa Kota Semarang memiliki presentase kemiskinan yang kecil walaupun dari tahun 2019-2020 mengalami peningkatan. Hal ini terjadi karena Covid-19. Berdasarkan IPM Kota Semarang dan presentase kemiskinan Kota Semarang berarti masyarakat dapat dikatakan kualitas hidup dan kesejahteraannya sudah baik termasuk kesejahteraan penyandang disabilitas, namun pada kenyataannya banyak penyandang disabilitas yang masih tergolong miskin dan masuk pada DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas memaparkan bahwa dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat khususnya pada kesejahteraan

kaum disabilitas harus meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Adapun rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial juga termuat dalam Peraturan Walikota Semarang No. 68 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Semarang terkait bidang-bidang yang ada di Dinas Sosial Kota Semarang.

Setiap tahun jumlah masyarakat penyandang disabilitas tentunya semakin banyak. Hal ini kemudian mendasari Pemerintah Kota Semarang dalam mewujudkan seluruh hak yang dimiliki para penyandang disabilitas melalui peran Dinas Sosial Kota Semarang. Akan tetapi beberapa permasalahan ditemukan dan membuktikan bahwa peran Dinas Sosial Kota Semarang dalam meningkatkan kesejahteraan disabilitas belum maksimal. Permasalahan tersebut yaitu :

- 1) Aksesibilitas tempat beribadah yang masih kurang memadai sehingga berakibat kepada masyarakat disabilitas yang beragam muslim pada saat ibadah Sholat Jum'at sering kali sholat di teras masjid dan tempat parkir. Hal ini menunjukkan bahwa Peran Dinas Sosial terkait kesamaan hak penyandang disabilitas dalam hal memperoleh aksesibilitas belum diperhatikan secara maksimal.
- 2) Presentase jumlah penyandang disabilitas miskin tahun 2017 cukup yaitu 65,7% atau 3.811 warga dari total jumlah masyarakat disabilitas Kota Semarang tahun 2019 yaitu 5.800 warga.
- 3) Presentase jumlah DTKS disabilitas Kota Semarang tahun 2020 cukup tinggi yaitu 55,91% dengan jumlah 3.243 warga dari total masyarakat disabilitas Kota Semarang 2019 yaitu 5.800 warga.
- 4) Terdapat kesenjangan antara angka IPM Kota Semarang dari tahun 2010-2019 yang selalu mengalami peningkatan dan presentase kemiskinan Kota Semarang

dari tahun 2018-2020 yang tergolong kecil dengan kesejahteraan masyarakat disabilitas dimana presentase masyarakat disabilitas miskin tahun 2017 sebesar 65,7% dan presentase jumlah DTKS disabilitas tahun 2020 sebesar 55,91%.

Adanya permasalahan kesejahteraan masyarakat disabilitas yang sebelumnya telah dijelaskan maka penulis tertarik untuk menggali tentang bagaimana peran Dinas Sosial Kota Semarang dalam meningkatkan kesejahteraan disabilitas serta apa saja faktor pendorong dan penghambat Dinas Sosial Kota Semarang dalam menjalankan perannya yaitu meningkatkan kesejahteraan disabilitas.

B. Kajian Teori

1. Administrasi Publik

Administrasi publik diibaratkan seperti sebagian dari siklus organisasi atau individu yang memiliki relasi dekat dengan implemetasi hukum dan prosedur yang sebelumnya telah diberlakukan oleh lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Hal tersebut merupakan kesimpulan yang diungkapkan oleh George J. Gordon dalam Inu Kencana Syafii (2010:25).

2. Manajemen Publik

Proses dalam menggerakkan sejumlah sumber daya manusia dan non manusia dalam menjalankan “perintah” yang dibentuk oleh kebijakan publik didefinisikan sebagai manajemen publik, yang dimana hal ini dikemukakan oleh Ott, Hyde dan Shafritz (1991: 10) dalam Keban (2014: 93).

3. Perilaku Organisasi

Stephen P. Robbins (2008 : 11) menyatakan perilaku organisasi menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh tentang individu, kelompok dan pengaruh dari struktur terhadap perilaku untuk membuat organisasi bekerja secara lebih efektif. Hal yang dibahas dalam perilaku organisasi salah satunya dasar-dasar perilaku kelompok. Dasar-dasar perilaku kelompok didalamnya menjelaskan tentang norma, status dan peran.

4. Peran

Seorang individu ataupun kelompok ketika dia menjalankan hak dan kewajibannya maka dia menjalankan suatu peran, hal tersebut diungkapkan oleh Robert Linton dalam Aco Musaddad (2018 : 28). Menurut Jam Ife dan Frank Tesoriero (2008 : 558-613) terdapat beberapa indikator peran yang harus dimiliki oleh kelompok atau individu pada sebuah organisasi yaitu peran fasilitatif, peran edukasional, peran representatif dan peran teknik. Menurut Horton dan Hunt dalam Chrecencya Ekarishanti dan Kismartini (2019) faktor pendorong peran yaitu kompetensi, sosialisasi dan perilaku peran. Adapun faktor penghambat peran yaitu *role conflict*, *role transition* dan *role distance*.

5. Kesejahteraan Masyarakat

Menurut Dolgoff, Feldstein, dan Stolnik dalam Bagus Aryo dan Rissalwan (2014 : 2) berpendapat bahwa kesejahteraan sosial adalah semua intervensi sosial yang ditujukan untuk meningkatkan atau mempertahankan keberfungsian sosial

manusia. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial menurut UU 11 Tahun 2009 sendiri meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.

6. Disabilitas

Menurut Akhmad Soleh (2016 : 22) bahwa disabilitas atau cacat ialah sekelompok masyarakat yang terbatas secara fisik, mental, kependaian, dan sensorik dalam waktu yang lama dimana keterbatasan tersebut menyebabkan mereka kesulitan dalam berpartisipasi aktif di lingkungan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Subjek penelitian didapatkan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data ialah observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Analisis dan interpretasi data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Kualitas data menggunakan teknik triangulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Dinas Sosial Kota Semarang

1. Peran Fasilitatif

Peran fasilitatif yang dilaksanakan meliputi pemberian dorongan/motivasi, pemberian jaminan sosial dan rehabilitasi sosial. Pemberian dorongan/motivasi dilakukan melalui kegiatan bimbingan dan pelatihan dengan melibatkan komunitas penyandang disabilitas. Pemberian jaminan sosial hanya berperan memberikan dan memfasilitasi data kepada pegawai PKH dari Kementerian Sosial RI. Pemberian rehabilitasi dilakukan melalui kegiatan pelatihan, pemberian alat bantu, merekomendasikan panti dan observasi langsung khusus disabilitas terlantar. Berdasarkan tiga hal yang meliputi peran fasilitatif ternyata pada dua point lainnya mengalami kendala yaitu pemberian jaminan sosial karena masyarakat belum merasakan pendamping cek kesehatan dan rehabilitasi sosial melalui pelatihan

keterbatasan anggaran, kuota dan belum *accessible*.

2. Peran Edukasional

Peran edukasional meliputi peningkatan pengetahuan dan keterampilan, pemberian informasi terkait potensi berpeluang, peningkatan kesadaran masyarakat disabilitas dan pelatihan. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan berperan sebagai pengawas, penyusun kegiatan, memastikan kegiatan berjalan lancar dan pembuatan SPJ. Pemberian informasi terkait potensi berpeluang melalui sosialisasi dan memanfaatkan komunitas sebagai jembatan penghubung. Peningkatan kesadaran masyarakat melalui kegiatan pertemuan rutin HIMIKS dan memanfaatkan HDI. Pelatihan yang diberikan merujuk pada bidang kewirausahaan. Berdasarkan empat hal yang meliputi peran edukasional ternyata pada point pelatihan mengalami kendala. Pelatihan yang dilaksanakan Dinas Sosial Kota Semarang ternyata belum menjangkau semua jenis disabilitas.

3. Peran Representatif

Peran representatif meliputi kerjasama dalam pembinaan dan pengembangan potensi, tindakan promosi, membuka jaringan kerja dengan pihak lain, melakukan tindakan perlindungan bagi disabilitas tediskriminasi dan mendapatkan modal usaha. Kerjasama yang dilakukan Dinas Sosial Kota Semarang melibatkan beberapa LPK, perhimpunan Ohana, dan Kampung Batik. Promosi dilakukan dengan memfasilitasi stand pameran, membeli produk makanan untuk rapat dinas dan memasukan jasa pijat tuna netra ke Bisnisku.com. Dinas Sosial Kota Semarang dalam membuka jaringan kerja hanya membantu pihak swasta mencari disabilitas yang dibutuhkan. Tindakan perlindungan bagi disabilitas tediskriminasi dilakukan dengan merespon kasus khususnya bullying anak dan pelecehan seksual. Dinas Sosial Kota Semarang dalam membantu mendapatkan modal usaha hanya berperan memberikan data dan membuat SPJ. Berdasarkan lima hal yang meliputi peran

representatif ternyata pada point tindakan promosi mengalami kendala. Tindakan promosi yang dilakukan Dinas Sosial Kota Semarang melalui kegiatan HDI dan Jateng Expo dengan memfasilitasi stand pameran belum berdampak besar.

4. Peran Teknik

Peran teknis meliputi kemampuan dalam input dan analisis data dan kreatifitas pegawai dalam menciptakan suasana nyaman. Pegawai sudah memiliki kemampuan yang baik dalam input dan analisis data. Kreatifitas pegawai dalam menciptakan suasana nyaman dengan memberikan *ice breaking* ataupun *games* pada saat jeda kegiatan. Berdasarkan dua hal yang meliputi peran teknis ternyata mengalami kendala pada data yang didapatkan belum valid karena mengandalkan data dari ibu-ibu PKK sedangkan mereka belum paham mengelompokan jenis disabilitas.

B. Faktor Pendorong dan Penghambat Peran

1. Faktor Pendorong Peran

a. Kompetensi

Kompetensi meliputi pengetahuan, pengalaman kerja dan pendidikan pegawai. Pengetahuan diuji melalui sistem rekrutmen khususnya pada tahap tes tertulis. Pengalaman kerja sudah baik karena pegawai sudah bekerja cukup lama dan didukung kegiatan seminar yang diikuti. Pendidikan pegawai memiliki jenjang pendidikan S1 sedangkan pendamping PKH dari SMA-S2.

b. Sosialisasi

Sosialisasi meliputi penyampaian informasi dan bahasa yang digunakan. Penyampaian informasi ditujukan kepada masyarakat disabilitas, orang tua yang memiliki anak disabilitas, pemerintah ditingkat kecamatan dan kelurahan. Bahasa yang digunakan cenderung menggunakan bahasa informal.

c. Perilaku Peran

Perilaku peran meliputi kesesuaian pendidikan dengan kedudukannya dan sikap tanggungjawab pegawai. Pendidikan pegawai dengan kedudukannya di seksi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan pendamping disabilitas Kementerian Sosial RI sudah sesuai sedangkan bagi pegawai Kementerian Sosial RI yang memiliki peran memberikan jaminan sosial bagi disabilitas belum sesuai. Bentuk sikap tanggungjawab pegawai yaitu membuat laporan SPJ dan laporan bulanan secara tertulis.

2. Faktor Penghambat Peran

a. Role Transition

Role transition meliputi perubahan jabatan dan kemampuan pegawai dalam beradaptasi dengan jabatan baru. Perubahan jabatan seringkali dilakukan pada pegawai ASN seperti Kepala Seksi dan beberapa staff sedangkan bagi pegawai yang non ASN jarang mengalami perubahan jabatan.

Kemampuan pegawai dalam beradaptasi dengan jabatan baru memerlukan waktu dan bergantung pada kesadaran setiap pegawai untuk meningkatkan kemampuannya.

b. Role Distance

Role transition meliputi perubahan jabatan dan kemampuan pegawai dalam beradaptasi dengan jabatan baru. Pegawai dalam menyikapi ketidakdilan pembagian peran dan tugas dengan profesional. Terlepas dari hal itu ternyata terdapat pegawai yang memiliki lebih dari satu jabatan sehingga pegawai tersebut memiliki peran ganda. Pegawai tidak menutupi bahwa terkadang merasa terbebani atas beban kerja yang diberikan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan :

1. Peran yang dilaksanakan Dinas Sosial Kota Semarang sudah cukup baik tetapi belum maksimal karena disetiap peran

yang dijalankan ternyata ditemukan kendala terlepas dari faktor penghambat. Adapun peran yang dilaksanakan meliputi peran fasilitatif, edukasional, representatif, dan peran teknik.

2. Faktor pendorong dan penghambat peran antara teori yang digunakan sebagai pedoman dengan hasil penelitian sudah sesuai. Faktor pendorong peran yaitu kompetensi, sosialisasi, dan perilaku peran sedangkan faktor penghambat peran yaitu *role transition* dan *role distance*.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka peneliti menyarankan :

1. Bagi Pihak dan Mitra Dinsos Kota Semarang
 - a. Rehabilitasi sosial melalui pelatihan pada peran fasilitatif perlu Memprioritaskan tempat pelatihan yang mudah diakses dan melakukan keberlanjutan kegiatan pelatihan dengan menyerahkan kepada komunitas penyandang disabilitas.

Adapun dalam memberikan pelatihan juga untuk memperhatikan segmentasi pasar saat ini.

- b. Jaminan sosial dalam bentuk pendampingan kesehatan yang belum dilaksanakan pada peran fasilitatif pihak Dinsos dan mitra Dinsos Kota Semarang perlu meningkatkan kinerja pegawai dan memberikan sanksi tegas kepada pegawai berupa teguran lisan ataupun tertulis bagi mereka yang tidak melaksanakan perannya.
- c. *Role transition* yang terjadi di Dinas Sosial Kota Semarang perlu memperhatikan perubahan jabatan pegawai non ASN dengan memberikan insentif ataupun penghargaan apabila mereka memang tidak dapat naik jabatan dan perlu meminimalisir pergantian kebijakan setiap ada pergantian jabatan Kepala Dinas.
- d. *Role distance* yang terjadi di Dinas Sosial Kota Semarang perlu adanya

tindakan kerjasama antara pegawai Dinas Sosial Kota Semarang, Seksi dan Kepala Dinas dalam bentuk koordinasi, kontrol, sharing dengan bawahannya sehingga pegawai staff tidak terbebani dengan tugas yang diberikan.

2. Bagi Penelitian Selanjutnya

- a. Peneliti selanjutnya apabila melakukan penelitian disarankan lebih memfokuskan judul penelitian tentang peran fasilitatif Dinas Sosial dalam meningkatkan kesejahteraan atau peran Dinas Sosial dalam meningkatkan kesejahteraan disabilitas di bidang jaminan dan rehabilitasi sosial.
- b. Peneliti disarankan untuk memperhatikan teori yang digunakan sebagai pedoman dan memperbanyak literatur baik dari buku, jurnal atau regulasi yang berkaitan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aryo, Bagus dan Rissalwan H.R. 2014. *Kebencanaan dan Kesejahteraan : Konsep dan Praktek*. Jakarta: Lembaga Kemitraan Pembangunan Sosial.
- Busro, Muhammad. 2018. *Teori-Teori Manajemen Sumber Daya Manusia*. Cet. Ke-1. Jakarta: Prenadmedia Group.
- Dwi, Narwoko, J., dan Suyanto. 2006. *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan*. Jakarta: Kencana.
- Handoko, T. Hani. 2009. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Jam Ife dan Frank Tesoriero. 2016. *Community Development Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2016.
- Keban, Yeremias T, SU, MURP. 2014. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*. Cet. Ke-1. Yogyakarta: Gava Media.
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Musadadd, Aco. 2018. *Anangguru : dalam Perubahan Sosial di Mandar*. Cet. Ke-1. Polewali Mandar: Gerbang Visual.
- Pasolong, Harbani. 2013. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Pratiwi, Ari, dkk. 2018. *Disabilitas dan Pendidikan Inklusif di Perguruan Tinggi*. Cet. Ke-1. Malang: UB Press.
- Putra, Teddy Minahasa. 2019. *Pelayanan Publik, Good Governance dan Ketahanan Nasional*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Robbins, Stephen P. 2008. *Perilaku Organisasi 1*. Ed. 12. Jakarta: Salemba Empat.
- Soekanto, Soerjono. 2010. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soleh, Akhmad. 2016. *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas terhadap Perguruan Tinggi : Studi Kasus di Empat Perguruan Tinggi Negeri Yogyakarta*. Cet. Ke-1. Yogyakarta: LkiS Pelangi Aksara.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cet. Ke-23. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cet. Ke-14. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Cet. Ke-8. Bandung: Alfabeta.
- Suhardono, Edy. 2016. *Teori Peran : Konsep, Derivasi dan Implikasinya*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Syafiie, Inu Kencana. 2010. *Ilmu Administrasi Publik*. Cet. Ke-2. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Perundang-Undangan

- Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas.
- Peraturan Walikota Semarang Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial kota Semarang
- Undang-undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Masyarakat.

Jurnal dan Skripsi

- Al-Zoubi, Suhail Mahmoud dan Majdoleen Sultan Bani Abdel Rahman. 2017. "Social Empowerment Of Individuals With Intellectual Disabilities." *European Journal Of Education Studies*, Vol. 3, Issue 9.
- Andnyani, Ni Nyoman Puspa dan I Nyoman Surata. 2019. "Peranan Dinas Sosial Dalam Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Di

- Kabupaten Buleleng.” *Jurnal Hukum*, Vol. 7 No. 2.
- Ardiansyah, Darman. 2015. “Peran Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2014.” *Skripsi* Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang.
- Arianti, Tri Puji. 2018. “Peran Dinas Sosial Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Disabilitas Di Kota Balikpapan.” *Ejournal Sosiatri-Sosiologi*.
- Baturangka, Theresia. 2019. “Peran Dinas Sosial Kota Manado Dalam Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas.” *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Sam Ratulangi*, Vol. 3 No. 3.
- Ekarishanti, Chrecencya, dan Kismartini. 2019. “*Voluntary Instrument* Pada Kebijakan Pengelolaan Sampah Di TPA Bantargebang.” *Jurnal Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro*.
- Kham, Tran Van Kham dan Heung Seek Cho. 2016. “Social Welfare Policies For People With Disabilities In Vietnam And South Korea.” *Jurnal University Of Social Sciences And Humanities*.
- Kumar, Dev Nandan. 2017. “Empowerment Of Persons With Disabilities Through Institutional Based Rehabilitation Services.” *Asian Journal Of Science And Technology*, Vol. 08, Issue 09.
- Lestari, Eta Yuni, dkk. 2017. “Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Semarang Melalui Implementasi Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (CPRD) Dalam Bidang Pendidikan.” *Jurnal Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang*.
- Novianti, Ranti dan Husen Aku Akbar. 2017. “Rehabilitation Based Society Model As The Fulfillment Of Childs’s Need Effort With Disability.” *Jurnal Universitas Islam Nusantara*.
- Muldon, Patricia dan Gloria Kirwan. 2015. “In Safe Hands:Empowering Young Peoplewith Disabilities Who Receive Assistance With Intimate Personal Care.” *Social Work & Social Sciences Review*.
- Pawalin, Oca. 2017. “Peran Dinas Sosial Kota Metro Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.” *Skripsi Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung*.
- Sosiawati, Arini. 2017. “Peran Dinas Sosial Provinsi DIY Dalam Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas Tahun 2015 (Studi Kasus Asrama SLB Negeri 1 Kulon Progo).” *Jurnal Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.
- Tjahjanti, Prantasi Harmi, dkk. 2018. “Social Welfare for Disabled Communities.” *Jurnal Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR)*, Volume 125.

Website

- Badan Pusat Statistik. “Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2019”, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/02/17/1670/indeks-pembangunan-manusia--ipm--indonesia-pada-tahun-2019-mencapai-71-92.html> (Diakses 27 Maret 2020 Pukul 04.31 WIB)

Fajilin, Eka Yulianti. “5.800 Warga Semarang Menyandang Disabilitas, Sudahkan Kota Lumpia Ramah Difabel?”, [Tribunjateng.com](http://tribunjateng.com), Selasa, 3 Desember 2019. <https://jateng.tribunnews.com/2019/12/03/5800-warga-semarang-menyandang-disabilitas-sudahkan-kota-lumpia-ramah-difabel> (Diakses 1 April 2020 Pukul 07.51 WIB).

<http://dinsos.semarangkota.go.id/> (Diakses 1 April 2020 Pukul 08.03 WIB).

<https://semarangkota.bps.go.id/> (Diakses 28 Maret 2020 Pukul 17.12 WIB)

<https://semarangkota.bps.go.id/> (Diakses 12 Juni 2021 Pukul 14.06 WIB)

Kementrian Kesehatan RI. “Disabilitas”, <https://www.kemkes.go.id/> (Diakses 27 Maret 2020 Pukul 06.54 WIB)